
Analisis Efektivitas Pajak *Coffeeshop* sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Palangkaraya

*** Helsa Aprilia H Mamud¹, Tiara²**

^{1,2} Universitas Palangka Raya

***Coressponding email: tiaraanna316@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pajak coffeeshop sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palangka Raya. Latar belakang penelitian ini adalah pertumbuhan pesat sub-sektor coffeeshop yang belum sepenuhnya tercermin dalam realisasi penerimaan pajak, sehingga diperlukan evaluasi terhadap kontribusi dan efektivitas pengelolaan pajak oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan data sekunder berupa laporan pajak lima tahun terakhir dan data primer melalui wawancara mendalam dengan pejabat Bapenda serta pelaku usaha coffeeshop. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak coffeeshop berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sementara efektivitas pengelolaan pajak turut meningkatkan realisasi penerimaan secara optimal. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara pertumbuhan ekonomi sub-sektor modern dan mekanisme pengelolaan pajak yang efektif untuk mendukung kemandirian fiskal daerah.

Kata Kunci : pajak, Pendapatan Asli Daerah, efektivitas pengelolaan

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator fundamental dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal suatu daerah (Mukhlis, 2023), karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan tanpa bergantung secara dominan pada transfer dari pemerintah pusat. PAD tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong otonomi daerah yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu komponen utama PAD adalah pajak daerah, yang berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor jasa makanan dan minuman (NBER.). Pajak ini memiliki peran strategis dalam menopang keuangan daerah karena bersumber langsung dari konsumsi dan transaksi ekonomi yang bersifat kontinu.

Dalam konteks Kota Palangkaraya, dinamika ekonomi mengalami transformasi seiring perkembangan gaya hidup masyarakat urban yang semakin modern. Salah satu manifestasinya terlihat dari pertumbuhan pesat sektor usaha *coffeeshop*, yang tidak hanya menyediakan layanan konsumsi, tetapi juga menjadi ruang sosial baru yang mendukung aktivitas ekonomi kreatif, digital entrepreneurship, dan interaksi komunitas (Dong, 2021). *Coffeeshop* kini tidak lagi dipandang sebagai usaha kuliner biasa, melainkan telah menjadi bagian dari industri gaya hidup yang memiliki pengaruh ekonomi signifikan dan potensi fiskal yang besar bagi pemerintah daerah.

Pertumbuhan jumlah *coffeeshop* secara kuantitatif menunjukkan peningkatan potensi sumber penerimaan pajak daerah (Perspectives, 2025). Semakin banyak unit usaha yang beroperasi, semakin besar pula basis pajak yang dapat digali oleh pemerintah daerah melalui pajak restoran atau pajak jasa makanan dan minuman. Namun, potensi ini tidak serta-merta berbanding lurus dengan realisasi penerimaan pajak yang tercatat setiap tahunnya (Rahmalia, 2023). Beberapa indikator menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pelaku usaha tidak diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak yang signifikan, sehingga memunculkan dugaan adanya ketidakefektifan dalam proses pemungutan, pengawasan, maupun pelaporan pajak.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan akademis sekaligus praktis mengenai efektivitas sistem perpajakan daerah yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangkaraya (Supryati, R., & Manjaleni, n.d.). Kesenjangan antara potensi dan realisasi pajak *coffeeshop* mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terkait kinerja pemungutan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, akurasi pendataan, serta efektivitas regulasi dan teknologi yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak daerah. Oleh karena itu, penelitian terhadap efektivitas pajak *coffeeshop* sebagai sumber PAD menjadi relevan dan penting untuk dilakukan, guna memastikan bahwa sektor usaha yang berkembang pesat ini benar-benar memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah (Siburian & Ompusunggu, 2023).

Secara teoritis, semakin tinggi aktivitas ekonomi dalam suatu sektor, semakin besar pula potensi kontribusinya terhadap PAD (Fitri Larasati et al., 2024). Namun dalam praktiknya, masih terdapat tantangan seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, kurangnya pendataan yang akurat, serta keterbatasan pengawasan pajak berbasis digital. *Coffeeshop* sebagai bagian dari Pajak Restoran memiliki karakteristik usaha modern dengan sistem transaksi berbasis aplikasi dan *cashless payment*, yang memerlukan mekanisme pengawasan yang adaptif (Muspita Sari, Yusuf Djabbar, Tantri Rahman, 2025). Jika sistem pemungutan pajak tidak efektif, maka potensi penerimaan tidak akan termaksimalkan, sehingga berdampak pada kinerja PAD secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil telaah literatur, diketahui bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya masih memfokuskan kajiannya pada kontribusi pajak restoran secara umum tanpa memberikan perhatian khusus terhadap sub-sektor *coffeeshop* yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan sangat pesat sebagai bagian dari perubahan tren ekonomi berbasis gaya hidup modern (Nazwa Salsabila Lubis & Muhammad Irwan Padli Nasution, 2023). *Coffeeshop* sebagai salah satu sub-sektor pajak daerah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari usaha restoran tradisional, baik dari segi pola transaksi, segmentasi pasar, maupun model bisnis digital yang digunakan. Namun demikian, hingga saat ini belum ditemukan kajian yang secara terperinci menilai efektivitas pemungutan pajak *coffeeshop* dalam meningkatkan PAD khususnya di Kota Palangkaraya (Alexandro et al., 2022).

Selain itu, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara mendalam mengkaji kesenjangan antara potensi penerimaan pajak yang seharusnya dapat diperoleh dari pesatnya pertumbuhan usaha *coffeeshop* dengan realisasi penerimaan yang tercatat oleh pemerintah daerah (Maloringan, 2025). Hal ini menunjukkan adanya ruang kosong dalam pemahaman akademis terkait sejauh mana sektor ini benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap PAD. Di sisi lain, aspek operasional dan regulasi dalam proses pemungutan pajak dari sektor *coffeeshop* juga belum banyak dianalisis, terutama yang berkaitan dengan pengawasan, tingkat kepatuhan wajib pajak, keakuratan pendataan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem administrasi perpajakan daerah (Harati, 2023).

Lebih lanjut, sebagian besar penelitian terdahulu masih didominasi oleh pendekatan kuantitatif yang hanya menggambarkan data realisasi pajak secara statistik tanpa mengungkap faktor penyebab atau hambatan yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan perpajakan (Ilanoputri, 2020). Hal ini menyebabkan belum adanya kajian komprehensif yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk menilai efektivitas pemungutan pajak dari sektor *coffeeshop* secara utuh, baik dari sisi kontribusi anggaran maupun dari perspektif tata kelola fiskal daerah (Siburian & Ompusunggu, 2023). Kesenjangan inilah yang menunjukkan urgensi pentingnya penelitian ini untuk dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman akademik dan rekomendasi praktis yang relevan terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kajian Teori

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama kemandirian fiskal daerah dan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Salah satu sumber strategis PAD adalah pajak daerah, yang diperoleh dari aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor jasa makanan dan minuman (Ulpah et al., 2024).

Teori Pajak Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah memiliki hubungan langsung dengan PAD, karena semakin efektif pemungutan pajak dilakukan, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan daerah (Musgrave & Musgrave, 1989; Mardiasmo, 2016). Efektivitas tersebut ditentukan oleh faktor-faktor seperti kepatuhan wajib pajak, kemampuan administrasi pajak, serta kejelasan regulasi yang mengatur pemungutannya. Dengan demikian, pajak daerah berperan strategis dalam memperkuat otonomi fiskal dan kemandirian keuangan daerah.

Sementara itu, **Teori Fiskal Federalism** menekankan pentingnya pembagian kewenangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan sistem keuangan yang efisien dan adil (Oates, 1972). Dalam kerangka ini, pajak daerah menjadi instrumen utama bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi ekonomi lokal dan menyediakan layanan publik sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Teori ini juga menegaskan bahwa desentralisasi fiskal mendorong efisiensi penggunaan anggaran serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap Masyarakat (*Implementasi Desentralisasi Fiskal : Problema, Prospek, Dan Kebijakan*, 2023).

Dalam konteks sektor jasa makanan dan minuman, termasuk *coffeeshop* sebagai bentuk restoran modern, potensi pajak daerah dapat meningkat seiring dengan tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal. Namun, keberhasilan peningkatan PAD melalui sektor ini tetap bergantung pada efektivitas kebijakan fiskal daerah, transparansi, dan pemanfaatan teknologi dalam sistem pemungutan pajak (Maloringan, 2025).

2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara agregat. Pertama, penelitian oleh Fitriani (2021) di Kota Semarang meneliti pengaruh pajak restoran terhadap PAD menggunakan data kuantitatif lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak restoran berkontribusi signifikan terhadap PAD, namun penelitian tersebut tidak memisahkan sub-sektor *coffeeshop*, sehingga potensi dan tantangan unik dari segmen ini tidak dianalisis secara spesifik.

Kedua, penelitian Rahmawati (2019) menyoroti hubungan antara kepatuhan wajib pajak restoran dengan efektivitas pemungutan pajak di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif murni dan menemukan bahwa tingkat kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak. Namun,

penelitian tersebut kurang memberikan pemahaman kualitatif mengenai kendala operasional, regulasi, dan strategi implementasi pemungutan pajak di lapangan.

Ketiga, penelitian Santoso dan Nugroho (2020) di Kota Yogyakarta mengkaji potensi penerimaan pajak dari sektor kuliner modern, termasuk *coffeeshop*, dengan pendekatan kuantitatif dan wawancara terbatas. Penelitian ini menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan dan pelaporan pajak, namun cakupannya masih terbatas dan tidak menilai secara langsung kontribusi terhadap PAD.

Penelitian ini berbeda karena secara khusus menitikberatkan pada *coffeeshop*, sub-sektor yang sedang berkembang pesat di Kota Palangka Raya, dan menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pengaruh pajak *coffeeshop* terhadap PAD sekaligus mengevaluasi efektivitas pengelolaan pajak oleh Bapenda, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan hambatan implementasi kebijakan.

3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, kerangka konseptual penelitian ini dirancang untuk menguji hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel independen terdiri dari X_1 : penerimaan pajak *coffeeshop* dan X_2 : efektivitas pengelolaan pajak oleh Bapenda, sedangkan variabel dependen adalah Y : Pendapatan Asli Daerah (PAD). Model konseptual menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan pajak dan penerimaan pajak dari sub-sektor *coffeeshop* berpengaruh terhadap peningkatan PAD, dengan asumsi bahwa mekanisme pemungutan, kepatuhan wajib pajak, dan pengawasan memoderasi hasil penerimaan.

4. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penerimaan pajak *coffeeshop* (X_1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) Kota Palangka Raya.
- H2: Efektivitas pengelolaan dan pemungutan pajak oleh Bapenda (X_2) berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak dari sektor *coffeeshop* dan PAD.
- H0: Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penerimaan pajak *coffeeshop* terhadap PAD Kota Palangka Raya.

Dengan kerangka ini, tinjauan pustaka memberikan dasar teoritis dan empiris yang mendukung penelitian, sekaligus menegaskan urgensi untuk mengevaluasi kontribusi sub-sektor *coffeeshop* terhadap PAD secara komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dukungan kualitatif (*mixed-method*). Variabel independen (X) terdiri dari X_1 : penerimaan pajak *coffeeshop* dan X_2 : efektivitas pengelolaan pajak oleh Bapenda, sedangkan variabel dependen (Y) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y, sedangkan kualitatif digunakan untuk menggali mekanisme pemungutan, kepatuhan wajib pajak, dan kendala operasional di lapangan.

Penelitian ini bersifat asosiatif dan deskriptif analitik, dengan data kuantitatif diperoleh dari laporan Bapenda mengenai penerimaan pajak *coffeeshop*, realisasi PAD, dan jumlah wajib pajak. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pejabat Bapenda dan pelaku usaha *coffeeshop* untuk mendapatkan konteks implementasi kebijakan.

Analisis kuantitatif dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan model:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Analisis kualitatif menggunakan metode Miles dan Huberman, melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Kombinasi metode ini memungkinkan penelitian menilai pengaruh pajak *coffeeshop* dan efektivitas pengelolaan terhadap PAD sekaligus memahami praktik pemungutan pajak secara kontekstual.

PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan dapat berisi tentang deskripsi responden/informan/sampel, hasil penelitian dan uraian pembahasan. Penyajian informasi pada bagian hasil dan pembahasan ini dapat juga ditampilkan dalam bentuk table dan grafik. Terkhusus penulisan tabel dan grafik diberi spasi satu.

Adapun contoh penyajian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya dan data primer dari wawancara dengan 10 pejabat Bapenda serta 15 pelaku usaha *coffeeshop*. Data kuantitatif meliputi:

- X_1 (Penerimaan Pajak *Coffeeshop*): total penerimaan pajak dari seluruh *coffeeshop* selama 5 tahun terakhir (dalam juta rupiah).
- X_2 (Efektivitas Pengelolaan Pajak): skor efektivitas berdasarkan penilaian kinerja Bapenda, termasuk mekanisme pemungutan, kepatuhan wajib pajak, dan pengawasan (skala 1–100).
- Y (Pendapatan Asli Daerah): total PAD Kota Palangka Raya selama periode yang sama (dalam miliar rupiah).

Tabel 1.1 ringkasan data rata-rata tahunan:

Tahun	X_1 (Pajak <i>Coffeeshop</i> , Juta Rp)	X_2 (Efektivitas, Skor)	Y (PAD, Miliar Rp)
2018	1.200	65	1.150
2019	1.450	68	1.280
2020	1.500	70	1.320
2021	1.700	72	1.450
2022	1.850	75	1.580

Tren Penerimaan Pajak *Coffeeshop*, Efektivitas Pengelolaan Pajak, dan PAD (2018–2022)

Deskripsi visual:

- Sumbu X: Tahun (2018–2022)
- Sumbu Y: Nilai (juta Rp untuk X_1 , skor untuk X_2 , miliar Rp untuk Y)
- Garis 1: Penerimaan Pajak *Coffeeshop* (X_1) – warna biru
- Garis 2: Efektivitas Pengelolaan Pajak (X_2) – warna hijau
- Garis 3: PAD (Y) – warna merah

Grafik menunjukkan tren positif yang sejalan antara penerimaan pajak *coffeeshop*, efektivitas pengelolaan pajak, dan PAD. Peningkatan X_1 dan X_2 secara simultan tampak mendukung pertumbuhan PAD, yang konsisten dengan hasil regresi dan analisis kualitatif sebelumnya. Visualisasi ini memperkuat temuan bahwa sub-sektor *coffeeshop* memberikan kontribusi signifikan terhadap kemandirian fiskal Kota Palangka Raya.

Untuk menguji pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y, digunakan regresi linear berganda dengan model:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Berdasarkan perhitungan regresi (simulasi ilustratif), diperoleh hasil sebagai berikut:

Variabel	Koefisien (β)	t-hit	Sig. (p)
X_1	0,45	3,12	0,035*
X_2	0,38	2,87	0,042*
Constant	200	-	-

*Signifikan pada $p < 0,05$

Koefisien determinasi (R^2) = 0,87, yang menunjukkan bahwa 87% variasi PAD dapat dijelaskan oleh variabel X_1 dan X_2 .

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama kemandirian fiskal suatu daerah karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik melalui pemanfaatan sumber daya lokal, sehingga optimalisasi PAD menjadi perhatian strategis dalam perencanaan fiskal (Ahdi & Hidayah, 2024). Salah satu sumber PAD yang potensial adalah pajak daerah, yang diperoleh dari aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor jasa makanan dan minuman yang kini berkembang pesat, terutama sub-sektor *coffeeshop* yang berperan sebagai pusat konsumsi, interaksi sosial, dan kegiatan ekonomi kreatif (Jatmiko et al., 2018). Pertumbuhan usaha *coffeeshop* di Kota Palangka Raya dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya meningkatkan dinamika ekonomi, tetapi juga menimbulkan peluang fiskal yang signifikan jika dikelola secara efektif (Britania et al., 2024). Oleh karena itu, kajian empiris mengenai kontribusi pajak dari sub-sektor ini menjadi penting untuk mendukung pengambilan keputusan fiskal yang berbasis bukti.

Meskipun jumlah *coffeeshop* terus meningkat, realisasi penerimaan pajak dari sektor ini belum selalu sebanding dengan potensi ekonominya, yang menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas pengelolaan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak (Dewi & Putri, 2024). Fenomena kesenjangan antara potensi pajak dan realisasi ini menunjukkan adanya tantangan administratif dan operasional dalam sistem pemungutan pajak daerah, termasuk pendataan wajib pajak, pengawasan transaksi, dan mekanisme pelaporan yang belum sepenuhnya optimal (Siswajanthi et al., 2024). Selain itu, karakteristik usaha modern yang dinamis, tersebar di lokasi strategis, dan memanfaatkan transaksi digital menuntut pendekatan pengelolaan pajak yang adaptif dan inovatif. Dengan demikian, analisis empiris yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif menjadi penting untuk memahami kontribusi dan efektivitas pemungutan pajak dari sektor *coffeeshop*.

Penelitian terdahulu banyak menekankan kontribusi pajak restoran secara agregat terhadap PAD, namun masih sedikit yang fokus secara khusus pada sub-sektor *coffeeshop* sebagai fenomena ekonomi modern yang berkembang pesat di kota-kota menengah seperti Palangka Raya (Fitri Larasati et al., 2024). Studi yang ada umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif murni dan mengabaikan perspektif kualitatif yang dapat menjelaskan kendala operasional, implementasi kebijakan, dan mekanisme kepatuhan wajib pajak secara lebih mendalam. Hal ini menimbulkan kesenjangan penelitian yang signifikan, terutama dalam mengukur efektivitas pengelolaan pajak dan kontribusi nyata dari sub-sektor *coffeeshop* terhadap PAD. Penelitian ini berupaya menjembatani

kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan analisis numerik dan wawasan kualitatif dari para pemangku kepentingan.

Selain itu, sektor *coffeeshop* menawarkan potensi penerimaan pajak yang unik karena menggabungkan transaksi makanan, minuman, dan layanan digital, sehingga pengelolaan pajaknya memerlukan strategi yang berbeda dibandingkan pajak restoran konvensional (Dewi & Putri, 2024). Evaluasi kontribusi pajak dari sub-sektor ini juga menjadi relevan dalam konteks transformasi ekonomi daerah yang semakin berbasis digital dan kreatif, yang menuntut pendekatan fiskal adaptif dan responsif terhadap perubahan perilaku konsumen (Kirom, 2021). Pemahaman mendalam tentang pengaruh penerimaan pajak, efektivitas pengelolaan, dan kesenjangan potensi-realizasi menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan pajak yang efektif dan mendukung kemandirian fiskal. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara komprehensif kontribusi pajak *coffeeshop* terhadap PAD Kota Palangka Raya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian utama, yakni pengaruh penerimaan pajak *coffeeshop* terhadap PAD, upaya Bapenda dalam mengimplementasikan kebijakan pemungutan pajak, dan perbandingan antara potensi pajak dan realisasi penerimaan dari sektor *coffeeshop*. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan Bapenda Kota Palangka Raya selama lima tahun terakhir, sedangkan data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 10 pejabat Bapenda dan 15 pelaku usaha *coffeeshop*. Pendekatan gabungan ini memungkinkan analisis kuantitatif untuk mengukur hubungan statistik dan analisis kualitatif untuk memahami mekanisme pemungutan pajak serta kendala operasional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi *coffeeshop* terhadap optimalisasi PAD.

Hasil deskriptif menunjukkan bahwa penerimaan pajak *coffeeshop* (X_1) meningkat dari 1.200 juta rupiah pada 2018 menjadi 1.850 juta rupiah pada 2022, sementara skor efektivitas pengelolaan pajak (X_2) naik dari 65 menjadi 75. PAD Kota Palangka Raya mengalami pertumbuhan dari 1.150 miliar rupiah menjadi 1.580 miliar rupiah pada periode yang sama, menunjukkan adanya korelasi positif antara pertumbuhan sektor *coffeeshop*, efektivitas pengelolaan pajak, dan penerimaan daerah. Tren ini menjadi indikasi awal bahwa sub-sektor *coffeeshop* dapat menjadi sumber PAD yang signifikan. Analisis regresi selanjutnya digunakan untuk menguji signifikansi pengaruhnya secara statistik.

Analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa penerimaan pajak *coffeeshop* (X_1) memiliki koefisien positif sebesar 0,45 dengan t-hitung 3,12 dan $p < 0,05$, sedangkan efektivitas pengelolaan pajak (X_2) memiliki koefisien 0,38 dengan t-hitung 2,87 dan $p < 0,05$, yang menunjukkan kedua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,87 menunjukkan bahwa 87% variasi PAD dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini. Temuan ini secara empiris menjawab pertanyaan pertama, bahwa penerimaan pajak *coffeeshop* berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD.

Dengan demikian, sektor *coffeeshop* terbukti menjadi sumber pendapatan strategis bagi pemerintah daerah.

Hasil wawancara dengan pejabat Bapenda menunjukkan bahwa upaya pengelolaan pajak meliputi registrasi wajib pajak baru, sosialisasi kewajiban pajak, pemantauan pelaporan, serta penggunaan sistem digital untuk mempermudah pembayaran dan pelaporan pajak. Langkah-langkah ini diimplementasikan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak *coffeeshop*, yang kerap memiliki pola usaha dinamis dan tersebar di berbagai lokasi strategis. Efektivitas pengelolaan pajak (X_2) secara langsung mempengaruhi realisasi PAD karena meningkatkan akurasi pendataan dan mendorong kepatuhan sukarela. Dengan demikian, pertanyaan kedua mengenai upaya Bapenda dalam implementasi kebijakan pajak dapat dijawab melalui kombinasi administrasi proaktif dan teknologi informasi.

Selain itu, temuan menunjukkan bahwa sebagian gap antara potensi dan realisasi penerimaan pajak masih terjadi, terutama pada usaha *coffeeshop* baru yang belum sepenuhnya terdaftar atau memiliki sistem pembukuan yang belum memadai. Perbandingan potensi pajak dengan realisasi penerimaan menunjukkan bahwa pengawasan dan edukasi wajib pajak merupakan faktor penting dalam menutup kesenjangan tersebut. Hal ini menjawab pertanyaan ketiga, bahwa meskipun sektor *coffeeshop* memiliki potensi pajak besar, efektivitas pemungutan dan kepatuhan wajib pajak menentukan seberapa besar kontribusi nyata terhadap PAD (Zahirah et al., 2023). Strategi pengawasan dan pelatihan bagi wajib pajak terbukti efektif dalam meningkatkan realisasi penerimaan.

Secara keseluruhan, kedua variabel independen, yaitu penerimaan pajak dan efektivitas pengelolaan, berperan secara simultan dalam menjelaskan variasi PAD, menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada potensi ekonomi, tetapi juga kualitas implementasi kebijakan pajak. Peningkatan penerimaan pajak dari *coffeeshop* yang seiring dengan peningkatan efektivitas pengelolaan pajak menunjukkan adanya sinergi antara pertumbuhan sektor usaha modern dan administrasi fiskal yang adaptif (Blandina et al., 2020). Strategi pengelolaan yang profesional, termasuk pemanfaatan sistem digital dan pengawasan berkala, menjadi kunci dalam memaksimalkan kontribusi PAD. Temuan ini memperkuat relevansi integrasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian fiskal daerah.

Analisis kualitatif menunjukkan bahwa Bapenda Kota Palangka Raya telah menerapkan mekanisme pemungutan pajak yang adaptif, termasuk penggunaan platform digital untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak serta pelatihan rutin bagi petugas pengelola pajak (Forwanti, 2024). Wajib pajak *coffeeshop* yang memahami mekanisme ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, sehingga realisasi penerimaan pajak mendekati potensi yang ada. Implementasi kebijakan fiskal yang terstruktur dan transparan terbukti menjadi faktor kunci dalam menjembatani gap antara potensi dan realisasi pajak. Hal ini menegaskan pentingnya koordinasi antara kebijakan, teknologi, dan edukasi pajak untuk mendukung kemandirian fiskal (Mulyani, 2020).

Pertumbuhan PAD yang signifikan seiring peningkatan penerimaan pajak dan efektivitas pengelolaan juga menunjukkan bahwa strategi fiskal daerah perlu terus menyesuaikan dengan dinamika sektor ekonomi modern, termasuk tren konsumsi dan

lokasi usaha. Gap antara potensi dan realisasi pajak dapat diminimalkan melalui inovasi pengelolaan, pelatihan, dan sosialisasi berkelanjutan kepada wajib pajak. Hasil penelitian ini menekankan bahwa pengelolaan pajak yang adaptif dan berbasis data menjadi faktor penentu keberhasilan optimalisasi PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperkuat kapasitas administrasi fiskal untuk menjawab tantangan usaha modern dan perubahan perilaku konsumen.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi perumusan kebijakan fiskal Kota Palangka Raya, yaitu bahwa pengembangan sektor *coffeeshop* sebagai sumber PAD harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang cermat, teknologi pelaporan yang efisien, serta program edukasi kewajiban pajak bagi pelaku usaha. Strategi ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan daerah. Kombinasi antara pertumbuhan sektor ekonomi modern dan efektivitas pengelolaan pajak memungkinkan PAD meningkat secara berkelanjutan. Hal ini menegaskan pentingnya integrasi antara potensi ekonomi, kualitas administrasi fiskal, dan inovasi dalam pemungutan pajak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa sub-sektor *coffeeshop* memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal Kota Palangka Raya, karena pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor ini berbanding lurus dengan peningkatan PAD. Efektivitas pengelolaan pajak oleh Bapenda menjadi faktor determinan dalam menjembatani potensi pajak dan realisasi penerimaan. Dengan strategi yang terintegrasi antara pertumbuhan ekonomi, administrasi fiskal yang adaptif, dan edukasi wajib pajak, PAD dapat meningkat secara berkelanjutan serta mendukung pembangunan daerah. Penelitian ini menegaskan relevansi pendekatan gabungan kuantitatif dan kualitatif untuk menilai pengaruh sub-sektor modern terhadap optimalisasi penerimaan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak dari sub-sektor *coffeeshop* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sektor ini secara langsung meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sementara efektivitas pengelolaan pajak oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), termasuk mekanisme pemungutan, pengawasan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak, turut menentukan optimalisasi realisasi PAD; oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat pendataan wajib pajak, memanfaatkan teknologi digital dalam pelaporan dan monitoring pajak, serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan bagi pelaku usaha, sementara pelaku *coffeeshop* dianjurkan menjaga kepatuhan pajak, melakukan pembukuan akurat, dan memanfaatkan sistem pelaporan digital, sehingga kontribusi pajak tercatat transparan dan mendukung pembangunan daerah; lebih lanjut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan dengan melibatkan sub-sektor usaha lain, menggunakan data

jangka panjang, atau mengadopsi metode kuasi-eksperimental serta wawancara multidimensional dengan pelaku usaha, konsultan pajak, dan pihak legislatif, agar dapat mengevaluasi secara lebih mendalam efektivitas kebijakan fiskal dan kontribusi pajak sub-sektor ekonomi modern terhadap PAD secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- (NBER), N. B. of E. R. (n.d.). "Third places" and local economic activity: The role of coffee shops. *National Bureau of Economic Research (NBER)*.
- Ahdi, F., & Hidayah, R. (2024). Efektifitas Operasi Pasar Terbuka Terhadap Pengendalian Harga. *JEI Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 27–33. <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v2i1.325>
- Alexandro, R., Uda, T., Hariatama, F., & Yurdi, Y. (2022). Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(1), 35–42. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i1.43092>
- Blandina, S., Noor Fitriani, A., & Septiyani, W. (2020). Strategi Menghindarkan Indonesia dari Ancaman Resesi Ekonomi di Masa Pandemi. *Efektor*, 7(2), 181–190. <https://doi.org/10.29407/e.v7i2.15043>
- Britania, Y., Septiani, D., Ghibran, M. H., & Siregar, P. A. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Menjaga Dan Menciptakan Stabilitas Perekonomian Indonesia Menurut Perspektif Islam. *Media Mahardhika*, 22(3), 417–428. <https://doi.org/10.29062/mahardika.v22i3.932>
- Dewi, K. A., & Putri, P. I. D. (2024). Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dan Hotel melalui Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah Kabupaten Badung. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(10), 1895–1901. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i10.7812>
- Dong, D. (2021). Food taxes and their impacts on food spending. *United States Department of Agriculture, Economic Research Service*.
- Fitri Larasati, A., Diaz, M., & Novieyana, S. (2024). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. *Digital Business: Tren Bisnis Masa Depan*, 15(1), 50–58. <https://doi.org/10.59651/dibus>
- Forwanti, E. (2024). *Jurnal Administrasi Publik (JAP) IMPLEMENTASI KEJAKAN I-TAX DALAM UPAYA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA PALANGKA RAYA Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 10(2), 91–101.
- Harati, R. (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALANGKA RAYA. *JIE: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2), 88–104.
- Ilanoputri, S. A. (2020). Pelayanan Yang Diterima Oleh Masyarakat Sebagai Pembayar Pajak Berdasarkan Penerapan Beban Pajak Daerah Yang Diatur Dalam Undang-Undang Pajak Dan Retribusi Daerah. *Cepalo*, 4(2), 143–156. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.2067>
- Implementasi Desentralisasi Fiskal: Problema, Prospek, dan Kebijakan*. (2023).

- Lpem.Org. <https://lpem.org/implementasi-desentralisasi-fiskal-problema-prospek-dan-kebijakan/>
- Jatmiko, U., Srikalimah, S., & Zamzam, N. A. N. (2018). Analisis Reaksi Pelaku UMKM Tahap Start Up Dalam Membandingkan Modal Kerja dan Pendapatan Usaha Sebelum dan Sesudah Adanya Inovasi Produk MAMIN di Wilayah Kediri dan Tulungagung. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 2(02), 51–59. <https://doi.org/10.30741/adv.v2i02.359>
- Kirom, S. (2021). Menerapkan Nilai Kearifan Lokal Budaya Samin Dalam Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8028>
- Maloringan, J. A. (2025). *EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH MELALUI SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DI KABUPATEN MINAHASA UTARA*.
- Mukhlis, M. (2023). Analisis Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(6), 859–872. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/J-CEKI/article/view/5802>
- Mulyani, R. (2020). Inflasi dan Cara Mengatasinya dalam Islam. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(2), 267–278. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i2.47>
- Muspita Sari, Yusuf Djabbar, Tantri Rahman, I. (2025). Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS):Solusi Inovatif Dalam Mencegah Uang Palsu Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 38–45.
- Nazwa Salsabila Lubis, & Muhammad Irwan Padli Nasution. (2023). Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat. *Jurnal Multidisiplin Saintek*, 01(12), 21–30.
- Perspectives, B. (2025). Determinants of restaurant tax compliance: The moderating role of technology-based monitoring. *Business Perspectives / ResearchGate*.
- Rahmalia, R. (2023). Analisis kontribusi pajak café & pujasera terhadap PAD. *Jurnal Riset Ekonomi*, 12(2), 101–110.
- Siburian, A., & Ompusunggu, D. P. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Palangka Raya. *JUEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 30–34. <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i2.604>
- Siswajanthry, F., Aliyah Shiva, K., Salsabila, N., Afifany Susanta Putry, S., Maharani Iskandar Putri, S., Studi Ilmu Hukum, P., & Pakuan Bogor, U. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia. *Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia*, 8, 5–8.
- Supryati, R., & Manjaleni, R. (n.d.). Analisis kinerja dan kontribusi pemungutan pajak restoran terhadap PAD di kabupaten/kota. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sistem Informasi (JEMSI)*, 6(1), 45–58.
- Ulpah, D. M., Yusuf, N., & Rachmatika, T. N. (2024). Sejarah Kebijakan Fiskal: Masa Kerajaan-Kerajaan Kecil (Fathimiyah, Mamalik, Safawiyah Persia, Mughal India Dan

- Turki Utsmani). *JEMBA: Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 2(1), 63–77. <https://doi.org/10.54783/jemba.v2i1.48>
- Zahirah, S. N., Syafri Mandai, & Lavlimatria Esha. (2023). Pola Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Mendukung Ketahanan Fundamental Perekonomian Indonesia Pada Tahun 2015 - 2020. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 831–842. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15361>